

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat.

Pendidikan jangan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban, tapi kita juga harus pandai merencanakan, mengorganisir, mengemas, melaksanakan, mengevaluasi serta menindaklanjuti suatu proses pendidikan yang dilakukan secara bersinergi dan berkesinambungan. Di lingkungan lembaga pendidikan terlibat sejumlah manusia yang harus bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan (Sri Wardiah, 2015: 3).

Agar mampu berperan dalam persaingan global kita harus menyadari peran penting dunia pendidikan. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Berbicara mengenai mutu pendidikan, sumber daya manusia memegang peran yang penting dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara, masyarakat, orang tua dan pemerintah. Hubungan sekolah dengan masyarakat termasuk salah satu substansi manajemen pendidikan yang sangat krusial. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan efektif jika para pengelola pendidikan mampu melibatkan *stakeholders* (pihak yang berkepentingan), terutama peningkatan peran serta masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Mulyasa (2009:163) dalam bukunya Menjadi kepala sekolah yang profesional

menyebutkan bahwa “Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, disarankan perlunya pemberdayaan masyarakat dalam lingkungan sekolah secara optimal. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Disisi lain, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi jika kepala sekolah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (*mutualisma*)”.

Meningkatan kualitas pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan memiliki arti bahwa lulusan pendidikan memiliki kemampuan yang sesuai, sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pembangunan. mutu pendidikan sering diartikan sebagai karakteristik jasa pendidikan yang sesuai dengan kriteria tertentu untuk memenuhi kepuasan pengguna pendidikan, yakni peserta didik, orang tua, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam menjaga mutu proses tersebut, diperlukan adanya *quality controll* yang mengawasi jalannya proses dan segala komponen pendukungnya yaitu masyarakat dan pemerintah.

Sebagai konsekuensi untuk mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan stakeholders sekolah, maka perlu dikembangkan adanya wadah untuk menampung dan menyalurkannya. Wadah itu diberi nama Komite Sekolah. Dalam hubungannya dengan model MBS, keberadaan komite sekolah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan (satu paket) dengan MBS. Dengan demikian keberadaan komite sekolah merupakan suatu yang perlu ada dalam MBS. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, BAB I pasal 1 (25) yang menyatakan bahwa Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat pada hekekatnya adalah suatu sarana yang cukup

mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan siswa di sekolah. Oteng Sutisna (1990:170) mengemukakan bahwa perlunya program hubungan kerja sama sekolah dengan masyarakat adalah demi tercapainya program-program sekolah serta untuk mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat melalui komite sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 menyatakan bahwa peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan: (1) *advisory agency* (pemberi pertimbangan), (2) *supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) *controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan) dan (4) *mediator*, penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Dari konsep tersebut peningkatan mutu harus menyeluruh, fleksibel dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di antaranya kebijakan pembentukan Komite Sekolah yang akhir-akhir ini menjadi agenda dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Edward Sallis (2012:31) “Organisasi- organisasi yang menganggap serius pencapaian mutu, menyadari sebagian besar rahasia mutu berakar dari mendengar dan merespon secara simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan para pelanggan dan klien”, oleh karena itu keterlibatan masyarakat sangat penting sebagai sumber aspirasi dan tolak ukur pencapaian mutu. Konsep ini cenderung disambut dan diapresiasi sebagai sebuah angin segar dalam proses perjalanan penyelenggaraan lembaga pendidikan dengan lebih mengintensifkan pelibatan masyarakat hal tersebut muncul ketika pemerintah menerapkan system desentralisasi pendidikan.

Konsep Tersebut mendorong komite Sekolah dan masyarakat menjadi kesatuan dan saling melengkapi, bahkan dapat memberikan suatu warna terhadap perumusan mutu di sekolah. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi satuan pendidikan. Di sekolah

masyarakat dapat menjadi tumpuan atas peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tetapi pada dewasa ini masih banyak penyelenggaraan pendidikan yang masih mengesampingkan partisipasi masyarakat, pengadaan tenaga pendidik, sehingga penyelenggaraan pendidikan di masa sekarang ini menuntut adanya partisipasi masyarakat yang maksimal. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pada salah satu misinya dijelaskan agar memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi daerah, kemudian masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan atau Komite Sekolah.

Maka keberadaan Komite Sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya mutu pendidikan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng Komite Sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan serta menilai program-program sekolah.

Adanya pembentukan Komite Sekolah, masyarakat akan merasa memiliki sekolah. Karena komite sekolah berperan sebagai wadah dan tempat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Tetapi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap tujuan didirikannya Komite Sekolah menyebabkan peran Komite Sekolah hanya terpaku pada masalah pembangunan dan biaya pendidikan saja. Hal ini, mengakibatkan Komite Sekolah menjadi kurang respon terhadap berbagai program yang dihasilkan oleh sekolah karena terkadang komite jarang dilibatkan dalam menyusun program sekolah.

Agar peran serta masyarakat dapat diberdayakan dan ditingkatkan, maka sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik serta warga sekolah. Gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam konsep Komite Sekolah, merupakan suatu inisiatif dalam rangka memajukan sekolah, agar tidak ada persepsi yang menyatakan bahwa Komite

Sekolah sebagai wakil orangtua siswa dan masyarakat hanya memberikan peran berupa materi.

Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya dalam pencapaian mutu pendidikan komite sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah perencanaan program atau dalam hal ini Komite Sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan bersama sekolah. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan yang di paparkan di atas, fenomena tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian tentang peranan kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan lingkungan menuju sekolah Adiwiyata SD Negeri 5 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan memfokuskan pada peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*), sebagai pengontrol (*controlling agency*), sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) maupun sebagai penghubung /mediator

1.2 Fokus dan Lotus Penelitian

Menjelaskan objek dan informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Burhan, 2010: 76). Adapun fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan Peran Kinerja Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Lingkungan Menuju Sekolah Adiwiyata.

Sedangkan lokasi penelitian ini di SD 5 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Berdasarkan permasalahan yang di paparkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kinerja yang dilakukan oleh Komite Sekolah dan upaya apa yang dilakukan komite untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan, dengan memfokuskan pada peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberdayaan lingkungan menuju sekolah adiwiyata di SD Negeri 5 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran secara diskriptif tentang kinerja Komite Sekolah sebagai :

1. Apakah Peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan lingkungan menuju sekolah adiwiyata di SD Negeri 5 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberdayaan lingkungan menuju sekolah adiwiyata di SD Negeri 5 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus?
3. Solusinya Komite sekolah di SD Negeri 5 Karangbener ikut memberdayakan lingkungan dan membantu secara finansial dengan bantuan mengumpulkan barang bekas untuk menjadi sekolah Adiwiyata dengan tujuan bisa menjadi sekolah yang bermutu

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara diskriptif tentang kinerja Komite Sekolah sebagai:

1. Untuk mendeskripsikan peran kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan lingkungan menuju sekolah adiwiyata di SD Negeri 5 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pemberdayaan lingkungan menuju sekolah adiwiyata di SD Negeri 5 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai peran kinerja komite sekolah dalam peningkatan pelayanan mutu pendidikan.
 - b. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khusus pendidikan, terutama mengenai kinerja Komite Sekolah.

Hal lain yang dapat digali dari penelitian ini adalah kemungkinan munculnya pengembangan konsep-konsep kontekstual yang berkenaan dengan kinerja Komite Sekolah tersebut

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kemanfaatan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi sekolah yang bersangkutan untuk mengembangkan peran Komite Sekolah pada lembaga yang dikelolanya
- b. Sebagai bahan rujukan bagi kepala sekolah dalam merumuskan kinerja Komite Sekolah di SD/MI
- c. Sebagai masukan bagi instansi yang berwenang dalam pengembangan kinerja Komite Sekolah

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan akademik yang ada pada SD 5 Karangbener utamanya tentang *Peran Kinerja Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Lingkungan Menuju Sekolah Adiwiyata SD Negeri 5 Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus*

Peneliti memfokuskan penelitian hanya pada SD Negeri 5 Karangbener. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian, sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

